

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah satu dari berbagai banyak negara di dunia ini yang mempunyai kekayaan budaya. Kekayaan budaya tersebut diwariskan secara turun temurun kepada keturunan mereka yang selalu di dijaga oleh keturunannya agar tidak hilang dan luntur ditelan oleh zaman. Tanpa adanya Budaya suatu negara tidak memiliki ciri khas indentitas bangsa dimata Internasional. Kebudayaan Indonesia sangatlah beragam dan memiliki nilai sejarah dan estetika sangat tinggi, salah satunya seperti tarian Reyog Ponorogo.

Reyog Ponorogo adalah budaya seni tari yang berasal dari daerah Ponorogo Jawa Timur, dari beberapa kebudayaan salah satu kekayaan budaya daerah di Indonesia yang sangat terkenal, bukan saja di Indonesia, tetapi juga dimancanegara. Sebagai kesenian tradisional Reyog Ponorogo bukan saja menjadi kebanggaan daerah Ponorogo melainkan kebanggaan Indonesia. Pentas Reyog Ponorogo bukan hanya di pentaskan di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Perkembangan Reyog Ponorogo telah dikelola menjadi sebuah potensi/asset untuk kegiatan kepariwisataan budaya daerah. Dahulu kebudayaan yang digelar sebagai ritual tradisional dengan kesakralannya bergeser menjadi suatu industri pertunjukan yang digelar atas kepentingan pariwisata meski beberapa pementasan masih mempertahankan kesakralan di dalamnya. Optimalisasi potensi pariwisata Reog Ponorogo melalui pagelaran seni pertunjukkan tari dijadikan andalan untuk menarik wisatawan yang berkunjung di Ponorogo sehingga kesenian Reog ini menjadi ciri khas Kabupaten Ponorogo. Kesenian Reyog Ponorogo sebagai salah satu budaya asli Indonesia sempat menjadi topik yang banyak diperbincangkan, karena adanya isu beberapa waktu lalu negara Malaysia mengklaim kesenian Reyog Ponorogo adalah salah satu budaya asli negara tersebut. Hal ini menimbulkan protes/penentangan dari masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Ponorogo terhadap budaya asli Indonesia yang di klaim milik negara lain. Pengalaman tersebut, diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia untuk tetap melestarikan dan mempertahankan budaya- budaya asli Indonesia dari pengaruh buruk budaya asing (Titimangsa & Cristanto, 2013).

Reyog merupakan seni pertunjukan masyarakat Jawa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur, yang meliputi tari, drama dan musik. Pertunjukan kesenian reog disajikan dalam bentuk sendratari, yaitu suatu tarian dramatik yang tidak berdialog dan diharapkan

gerakan-gerakan tarian tersebut sudah cukup untuk mewakili isi dan tema dari tarian tersebut. Adapun unsur-unsur pementasan tokoh yang ditampilkan dalam kesenian Reog yakni Warok, Jathilan, Pujangga Anom, Klana Sewandono, dan Pembarong. Warok merupakan salah satu unsur Tarian dalam Reog. Menurut salah satu riwayat kisah Reog, Warok berasal dari bahasa Arab, Wara'a yang artinya orang yang melakukan hal-hal mistis. Dalam pentas, sosok Warok muda digambarkan sebagai punggawa Raja Klanasewandono yang tengah berlatih mengolah ilmu kanuragan. Sementara Warok tua digambarkan sebagai pelatih atau pengawas Warok muda. Unsur pementasan Reyog yang lainnya adalah Jathilan. Jathilan melambangkan pasukan kerajaan Majapahit yang lemah di bawah Bhre Kertabumi. Tarian ini dibawakan oleh 6–8 gadis yang menaiki kuda. Pada Reyog tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh laki-laki yang berpakaian wanita, yang biasa disebut Gemblak. Dalam dunia perwarokan, gemblak menggantikan posisi wanita bagi warok. Banyak sekali versi cerita mengenai Reog Ponorogo ini, salah satunya yaitu ceritanya Reog dalam cerita rakyat Ponorogo merupakan syarat yang diajukan Dewi Songgolangit ketika Raja Ponorogo yaitu Kelono Sewandono yang berniat melamarnya. Reog merupakan topeng harimau yang dihiasi bulu bulu merak. Dalam pementasan reog selalu disertai adanya warok dan juga pasukan berkuda kembar. Selain itu dalam pementasan reog juga disertai berbagai alat musik seperti gamelan, gong, terompet, angklung, dan juga kenongan yang mengiringi semua pemain Reog menari. (Yustiana, 2016)

Di Kabupaten Ponorogo sendiri, memiliki event resmi tahunan yang menyelenggarakan kesenian Reyog Ponorogo yaitu Festival Reog Nasional (FRN) yang diadakan setiap menjelang 1 Muharram/Grebeg Suro. Selain di event resmi, masyarakat Ponorogo juga sering mementaskan tarian Reyog Ponorogo pada saat hari-hari besar seperti khitanan, pernikahan, ataupun adat istiadat.

Reyog Ponorogo sempat menjadi bahan berita di Indonesia pada bulan November 2007, saat Tari Barongan, yang persis bahkan sama dengan Reog, menjadi bagian dari kampanye pariwisata Visit Malaysia 2007, 'Malaysia Truly Asia'. Yang paling menyinggung perasaan orang Ponorogo, sosok Singo Barong yang menjadi ikon Reog pakai topeng Dadak Merak dipentaskan tanpa tulisan 'Reyog Ponorogo' yang seharusnya ada di mana pun Reog dipentaskan. Malah tulisan Reog Ponorogo itu diganti dengan satu kata: 'Malaysia'.

Dan baru-baru ini kejadian tersebut seakan diingatkan lagi, tepatnya pada saat wawancara yang dilakukan oleh media massa nasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, bapak Muhadjir Effendi yang mana dalam wawancara tersebut beliau mengulas kembali apa yang pernah terjadi dengan kebudayaan reog yang pernah diklaim oleh Malaysia 2007 silam, beliau menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat mendaftarkan Reyog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli dari Indonesia khususnya Ponorogo, beliau juga menyebutkan bahwa pada saat waktu yang bersamaan Malaysia juga akan mengajukan pendaftaran kesenian tersebut ke UNESCO. Kemudian berita tersebut cepat beredar di media massa nasional bahwa adanya isu Reyog Ponorogo kembali di klaim oleh Malaysia. Dari berita yang beredar tersebutlah awal mula dari gejolaknya masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo, isu pengklaiman budaya tersebut mengakibatkan masyarakat dan juga para seniman Reyog Ponorogo geram, yang berujung pada aksi massa yang melakukan protes di depan Pemkab Ponorogo dengan mengadakan kesenian Reog Ponorogo setiap malam selama satu bulan penuh. Dalam aksi massa tersebut tak hanya sebagai aksi protes terhadap adanya isu pengklaiman Reyog, namun juga sebagai protes kekecewaan para seniman terkait keputusan mas Menteri Nadiem Makariem yang justru lebih mendahulukan Jamu daripada Reog Ponorogo untuk diusulkan ke UNESCO. Selain itu, para aksi massa tersebut menuntut kepada Pemerintah untuk segera mengajukan dan mempatenkan Reyog sebagai warisan budaya asli dari Kabupaten Ponorogo kepada UNESCO. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat, Reyog Ponorogo merupakan kesenian khas daerah Ponorogo yang pada akhirnya akan luntur apabila tidak ada campur tangan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan kesenian tersebut. Masalah pelestarian seni budaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama, baik pelaku seni, masyarakat, dan juga pemerintah (Mapson, 2010).

Dalam sebuah penelitian pasti mengalami suatu pembaharuan, persamaan, dan perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lain, oleh karena itu harus ada dari penelitian terdahulu sebagai dasar perbandingan, maka disajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian pertama, Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta: Kasus 'Pencurian' Reyog Ponorogo oleh (Mapson, 2010) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, penelitian ini terkait identitas aspek-aspek dari kebudayaan daerah supaya tidak diasingkan dari proyek

nasional. Keadaan ini mengakibatkan dinamika antara identitas nasional dan identitas daerah yang menarik, karena keduanya eksis secara bersamaan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Penelitian ini berfokus pada dinamika di konteks salah satu kebudayaan Kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo yang terkenal dengan kesenian Reyog, sebuah kesenian yang merupakan salah satu perwujudan dari kebudayaan lokal Ponorogo. Yang menjadi kontroversi akibat pernah dijiplak oleh Malaysia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat menggambarkan ikatan orang setempat melawan penjiplakan oleh Malaysia, karena kesenian Reyog sangat berharga bagi kebudayaan Ponorogo sebagai identitas dan jati diri kota dan masyarakat Ponorogo.

Penelitian kedua, Pengembangan dan Perlindungan Kekayaan Budaya Daerah: Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Adanya Klaim Oleh Pihak Lain oleh (Patji, 2010), Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI Jakarta. Penelitian ini terkait Pengembangan, pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan kebudayaan-kebudayaan daerah pada era globalisasi dimana kebudayaan daerah hidup dan berkembang secara dinamis dalam suatu suasana masyarakat pemangkunya yang juga berubah dalam hidup dan kehidupannya seiring proses perubahan kebudayaan bisa terjadi karena dilandasi oleh keinginan, bahkan kebutuhan, masyarakatnya, dimana perubahan itu adalah sesuatu yang memang direncanakan (planned change) ataupun tidak direncanakan (unplanned change), yang sangat rawan terhadap klaim kepemilikan suatu aset kebudayaan oleh pihak lain apalagi oleh pemerintah di negara lain, yang tentu sangat berbahaya terhadap eksistensi kebudayaan tersebut.

Penelitian ketiga, Fenomena dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reyog Ponorogo oleh (Arinda Emilia P, 2019) mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, penelitian ini terkait Tari Reyog Ponorogo yang sempat menjadi kontroversi berita di Indonesia pada bulan November 2007, saat Tari Barongan yang persis bahkan sama dengan Reyog, menjadi bagian dari kampanye pariwisata Visit Malaysia 2007, 'Malaysia Truly Asia'. Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa kontroversi itu disebabkan kesalahfahaman mengenai status kesenian secara hukum yang sedang mengalami pendefinisian ulang. Pemahaman kesenian sebagai cultural property (harta benda budaya) oleh pihak orang Ponorogo mengakibatkan kasus ini dipandang sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, dalam kasus ini kesenian yang dibicarakan sebenarnya sudah lama berada di kedua negara, dan pembebanan paradigme kepengarangan kepada kesenian, yang dulu dianggap sebagai milik bersama, pastinya mengakibatkan kebingungan mengenai status kesenian tersebut.

Adanya kejadian Reyog Ponorogo di klaim oleh negara tetangga itu bisa menjadi pelajaran penting bagi masyarakat dan juga pemerintah agar terus menjaga, melindungi dan melestarikan kesenian Reyog Ponorogo. Maka dari itu, peneliti tertarik mengambil judul **“Respon Pemerintah Kabupaten Ponorogo Terhadap Isu Klaim Reyog Oleh Malaysia Yang Beredar Di Media Massa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah teruraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana respon Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap isu klaim Reyog Ponorogo oleh Malaysia yang beredar di media massa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana respon Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait isu klaim Reyog Ponorogo oleh Malaysia yang beredar di media massa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diambil karena isu terkait klaim Reog ini sempat menjadi gejala khususnya para seniman dan juga masyarakat Ponorogo. Bahkan beredarnya isu terkait klaim Reyog ini hingga diberitakan media massa nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk perluasan pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dan manfaat bagi masyarakat luas khususnya pada bidang akademik sebagai sumber informasi maupun referensi bagi penyelesaian karya tulis ilmiah serupa selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kedepanya dalam menanggapi kasus serupa yang kaitanya dalam menghadapi suatu kasus klaim ataupun sengketa kebudayaan asli daerah.

b. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi dan referensi bagi pihak

instansi yang bersangkutan yakni Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam hal mempertahankan kebudayaan asli Kabupaten Ponorogo.

c. Peneliti

Diharapkan mampu memberikan pengalaman dan juga wawasan dalam penelitian yang kaitanya dengan suatu kasus klaim ataupun sengketa kebudayaan. Selain itu, peneliti juga dapat belajar dalam memecahkan suatu masalah.

E. Penegasan Istilah

1. Respon

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). berarti tanggapan, reaksi dan jawaban. Sedangkan menurut Ahmad Subandi, respon dengan istilah umpan balik yang memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan (Rahmat, 1999).

2. Isu

Isu adalah berbagai perkembangan yang biasanya terjadi didalam arena publik yang jika berlanjut ini secara signifikan akan dapat mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Dapat dikatakan bahwa isu adalah titik awal munculnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Menurut The Issue Management Council, jika terjadi gap atau perbedaan antara kebijakan, kebijakan, produk atau komitmen organisasi terhadap publiknya maka disitulah munculnya isu (Krisyantono, 2012).

Dari tulisan Horrison dalam buku (Public Relations, Issue, & Crisis Manajemen: Pendekatan Critical Public Relation, Etnografi, Kritis & Kualitatif, 2012), dapat dideskripsikan dua aspek jenis isu. Pertama, aspek dampaknya, ada dua jenis yaitu defensive dan offensive issues. Defensive Issues adalah isu-isu yang membuat cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi, dan oleh karena itu organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. Sementara Offensive Issues adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi organisasi atau perusahaan. Kedua, aspek keluasan isu, ada empat jenis yaitu: 1) Isu-isu

universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum dan berpotensi mempengaruhi secara langsung. 2) Isu-isu advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi banyak orang seperti isu universal. 3) Isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. 4) Isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang diantara para pakar. Isu bisa meliputi masalah, perubahan peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai yang sedang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Walaupun isu dapat berkembang tidak terduga dan bisa menghasilkan hal yang tidak diharapkan, isu tetap dapat diantisipasi.

3. Klaim

Secara bahasa, Klaim memiliki arti sebuah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu, pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.

4. Media Massa

Media massa merupakan singkatan dari Media Komunikasi Massa yang berarti sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas secara langsung. Fungsi dari media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. Sedangkan menurut jenisnya, media massa dibagi menjadi 3 yaitu, Media massa cetak, Media massa elektronik, dan Media massa online. Media massa menjadi faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi belajar sosial. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain (Soehadi, 1978).

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Anderson, 2011). Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah yang merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik yang dibuat diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara

langsung mengatur demi kepentingan publik, yakni rakyat, penduduk, masyarakat atau warga negara. Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena pilihan tersebut memiliki pengaruh dan dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu (Dye, 1992)

Kebijakan publik adalah rancangan yang dilembagakan untuk memecah masalah yang relevan di dunia nyata, dipandu oleh konsepsi dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggapi masalah sosial (Rinfret, Scheberie, & Pautz, 2018). Ruang lingkup kebijakan publik mencakup banyak bidang seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Kebijakan publik dapat bersifat hierarkis, mulai dari tatanan nasional, regional, dan lokal. David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Garceau & Easton, 1950). Laswell dan Kaplan juga memberikan definisi kebijakan publik sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai dalam praktik yang terarah (Lasswell, 1978). Thomas R. Dye juga turut memberikan definisi kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. (Dye, 1992) Secara lebih lanjut, Carl J. Friedrich menjabarkan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan ataupun tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dimana kebijakan ini diusulkan untuk mengatasi hambatan atau kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ronan, 1941). Berdasarkan definisi tersebut, ditekankan bahwa kebijakan publik merupakan realisasi dari sebuah tindakan, sehingga bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Menurut William Dunn, (Dunn, 1997) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tahapan-tahapan yang saling berurutan, yakni sebagai berikut:

A. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda atau *agenda setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat perlu untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy*

problem). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan (Dye, 1992) di antaranya:

- 1) Telah mencapai titik kritis tertentu dan jika diabaikan, akan menjadi ancaman
- 2) Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu dan berdampak dramatis
- 3) Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa
- 4) Menjangkau dampak yang amat luas
- 5) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat
- 6) Menyangkut suatu persoalan yang "fashionable" yaitu persoalan yang sulit dijelaskan, tapi mudah dirasakan kehadirannya

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan Stakeholder.

B. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah (Lassance, 2020).

C. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan

rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah dan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah (Lasswell, 1978).

Kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan publik yang di samping memenuhi maksud baik pemerintah untuk menyejahterakan warganya, juga memiliki akseptabilitas yang tinggi dari warga. Di sinilah peran dari psikologi kebijakan publik, yakni psikologi membantu para penyusun kebijakan publik untuk mempertimbangkan secara saksama, bukan hanya analisis untung-rugi melainkan penerimaan, kepuasan, dan kesejahteraan warga atas sebuah kebijakan publik, psikologi membantu proses politik yang dijalankan pihak-pihak yang menghasilkan kebijakan publik agar dapat melakukan pengelolaan konflik dan kepentingan secara manusiawi, psikologi membantu pemerintah untuk memberikan pengaruh-pengaruh edukatif dan sosial agar warga merasa aman dan nyaman di samping dapat menerima logika kebijakan yang telah diambil, serta psikologi dapat digunakan sebagai metode persuasi agar warga memiliki perasaan kewargaan (*sense of citizenship*), tidak mudah terkena kelelahan dalam partisipasi politik meskipun mengalami kekecewaan, bahkan mampu menawarkan masukan dan konsultasi kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan publik (Anindya, Leolita, & Abraham, 2017).

D. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Ronan, 1941). Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (Dunn, 1997).

G. Definisi Operasional

Definisi oprasional digunakan untuk mengoprasionalkan penelitian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk mendapatkan luaran. Definisi operasional pada penelitian ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Ponorogo dalam merespon isu klaim reyog oleh Malaysia yang beredar di media massa, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan agenda kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Tahap perumusan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Peran dan dukungan masyarakat/seniman reyog dalam mendukung kebijakan dari Pemerintah Ponorogo.
4. Pengembangan dan peninjauan ulang Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2005) adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu sosial yang berdasarkan pada pengamatan terhadap manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebuah alat pengumpul data utama, peneliti berinteraksi dengan responden, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam - macam baik data primer maupun data sekunder.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus merupakan sebuah cara yang digunakan untuk data sesuai kebutuhan dan mempelajari satu masalah yang timbul dari permasalahan sosial. Studi kasus yang bersifat kualitatif adalah satu upaya dalam melakukan deskripsi dan analisis yang mendalam dari suatu kasus tertentu. Yang dimaksud dengan kasus disini bisa berupa seseorang, suatu kelompok, suatu program, suatu institusi, suatu masyarakat tertentu ,atau suatu kebijakan tertentu (Suwarsono, 2016)

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Alasan dipilihnya lokasi penelitian di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga karena memang Instansi tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan di bidang kebudayaan khususnya di Kabupaten Ponorogo.

4. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan Teknik Purposive sampling yaitu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan peneliti dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Pertimbangan yang dimaksud adalah informan yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam situasi penelitian ini. Adapun Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel informan adalah seseorang yang berkaitan langsung dengan kebijakan di bidang kebudayaan yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Disbudparpora Kabupaten Ponorogo dan Kepala Staff Bidang Kebudayaan Disbudparpora Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Untuk mendukung keakuratan serta ketepatan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan atau komunikasi dengan maksud dan dengan tujuan tertentu. Pada penelitian ini teknik yang digunakan dengan memilih responden menggunakan teknik purposive sampling.. Dalam proses penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Staff Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ponorogo.

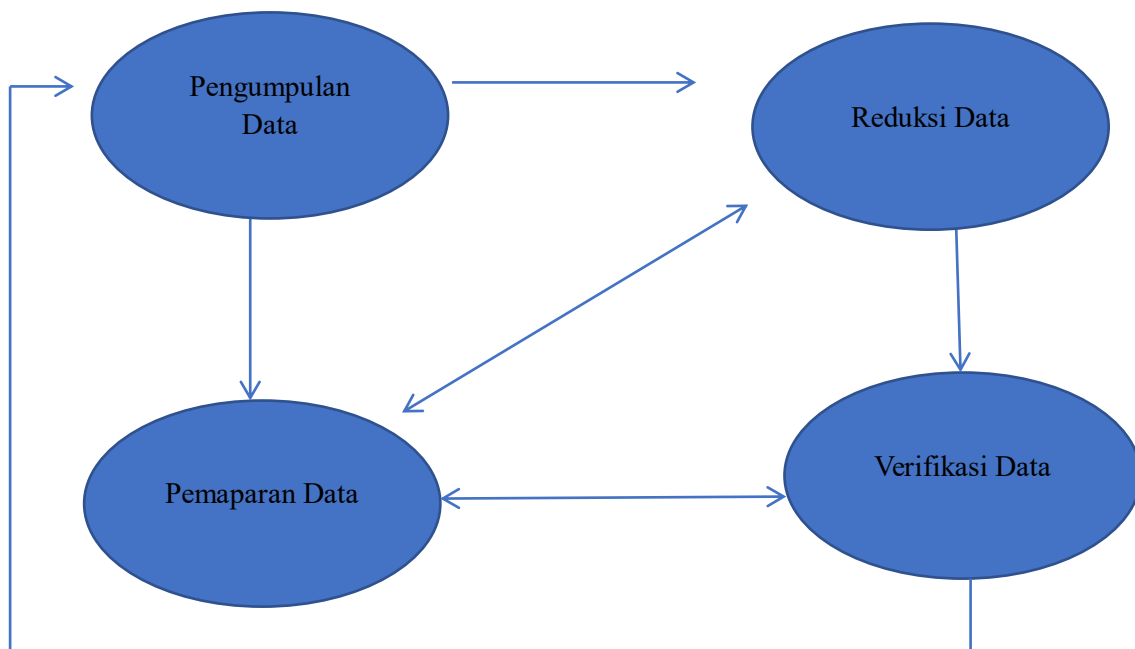
b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa bukti-bukti hasil studi lapangan supaya data maupun informasi yang diperoleh lebih otentik. Menurut (Setiawan, 2020) dokumentasi merupakan salah satu cara yang sering digunakan sebagai sumber untuk penelitian kualitatif. Dengan alasan karena dokumentasi akan memberikan hasil data berupa data deskriptif yang dapat digunakan untuk menelaah segi subjektif dan hasilnya dapat dianalisis secara induktif. Dokumentasi dalam

proses observasi ini dapat membantu peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis proses kebijakan pemerintah Ponorogo dalam merespon beredarnya isu klaim Reyog oleh Malaysia.

6. Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012) analisis data dalam proses penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam suatu periode tertentu. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, dan verifikasi data.



Gambar 1.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman

i. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat untuk melakukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

ii. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah langkah merangkum, memilih hal yang pokok, serta memfokuskan pada pola – pola tertentu. Data yang direduksi untuk mendapatkan

gambaran secara jelas dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas (Sugiyono, 2012). Dapat disimpulkan data yang telah direduksi ini akan memberikan gambaran – gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang akan di tindak lanjuti.

iii. Pemaparan Data

Langkah selanjutnya yaitu pemaparan data. Pemaparan data ini digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan tekstual berbentuk paragraf narasi. Dengan hal ini ,aka akan mempermudah untuk memahami apa yang telah terjadi dengan tujuan untuk melakukan proses pelaksanaan yang selanjutnya.

iv. Verifikasi Data

Langkah berikutnya yaitu dengan memverifikasi data atau membuat kesimpulan di dalamnya. Menurut Miles dan Huberman (Agustinus Agus Setiawan, 2020) , kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif ini berisi tentang uraian dari pertanyaan – pertanyaan yang ada yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber. Verifikasi data ini masih bersifat sementara dan dapat berubah – ubah sesuai dengan perubahan dari informasi yang di dapatkan.

7. Keabsahan Data

Pada teknik pengumpulan data, keabsahan data yaitu data yang tidak berbeda antara yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data sebagai pembanding terhadap data itu. Berikut teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumen.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguj kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil dokumentasi kemudian dicek dengan wawancara.